

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Mobilitas tenaga kerja antar negara menjadi fenomena yang umum terjadi. Salah satunya ialah ditunjukkannya keberadaan pekerja migran. Pekerja migran merupakan seseorang yang akan pergi, sedang pergi maupun telah pergi ke suatu negara dengan maksud bekerja dan mendapatkan upah dari hasil pekerjaannya di luar negeri. Pekerja migran menurut *International Labour Organization* adalah seseorang yang bermigrasi atau telah melakukan migrasi dari suatu negara ke negara lain dan orang tersebut akan dipekerjakan oleh siapapun selain dirinya sendiri (Utami & Serafica, 2021).

Orang yang bekerja di luar negeri ini disebut dengan TKI (Tenaga Kerja Indonesia), namun istilah ini diganti menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 mengenai perlindungan pekerja migran Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 pada Pasal 1 Angka 2, pengertian pekerja migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia (Nabila, 2022).

Negara Indonesia dihadapkan pada suatu permasalahan yaitu penyediaan lapangan pekerjaan yang terbatas khususnya di pedesaan. Dengan demikian, sebagian warga negara Indonesia bermigrasi ke luar negeri dengan bekerja di sektor formal dan informal untuk menjadi pekerja migran Indonesia (PMI). Hal ini didorong oleh keinginan untuk mengubah nasib hidup (Agustina & Mubarak, 2022). Jumlah PMI di Indonesia terus mengalami peningkatan diberbagai daerah. Peningkatan ini terlihat di Jawa Timur khususnya di Pulau Madura. Provinsi ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam penempatan tenaga kerjanya ke luar negeri.

Jumlah warga negara Indonesia dari wilayah provinsi Jawa Timur yang memilih menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) pada tahun 2024 mencapai 79.001 orang atau sebesar 26,67 % dari total keseluruhan PMI dari Indonesia

(Purmadani, 2025). Jumlah ini meningkat dari sebelumnya tahun 2023 yaitu sebanyak 68.069 orang, hal ini setara dengan 24.75% dari jumlah total keseluruhan warga negara Indonesia yang menjadi PMI (Yonatan, 2024). Diantara Kabupaten-Kabupaten di Madura, Kabupaten Sampang turut mengalami peningkatan dalam jumlah PMI-nya.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Sampang, jumlah PMI yang mendaftarkan diri secara legal mengalami peningkatan pada tahun 2023 yakni sebanyak 501 orang. Sebelumnya pada tahun 2022, PMI di Sampang hanya sekitar 200 orang (Alimuddin, 2024). Peningkatan jumlah PMI tersebut khususnya di Pulau Madura Kabupaten Sampang ini menimbulkan pertanyaan mengenai alasan PMI atau faktor-faktor yang mendorong mereka melakukan migrasi ke luar negeri. Dilihat dari kondisi sosial masyarakat Madura pada dasarnya adalah orang yang suka merantau dikarenakan keadaan wilayah yang tidak cocok untuk bertani, banyak masyarakat Madura yang bermigrasi menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) untuk mencari pekerjaan di luar negeri dengan harapan dapat memiliki kehidupan yang layak dari sisi ekonomi (Masluhah, 2022).

Berbagai alasan mendasari keputusan PMI untuk mencari nafkah di luar negeri. Keputusan seseorang menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) meliputi faktor pendorong dan faktor penarik. Faktor pendorong utama ialah tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah, dan merasa menjadi beban tanggungan keluarga. Ketika tingkat pendidikan rendah, maka sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan di daerah asal, hal ini mendorong pekerja migran bermigrasi ke luar negeri untuk mencari pekerjaan yang tidak ada batasan pendidikan dan mendapatkan upah yang tinggi sehingga membantu memperbaiki perekonomian keluarga (Rabbani, 2022). Pendapatan, pendapatan yang rendah mendorong seseorang untuk bermigrasi ke luar negeri. Pendapatan dari pekerjaan yang dilakukan di daerah asal yang rendah, sehingga tidak mencukupi kebutuhan ekonomi keluarga (Fikriansyah & Julia, 2023).

Faktor pendorong lainnya adalah banyak hutang dan kebutuhan sekolah anak yang besar. Beban hutang yang besar sering kali menjadi tekanan bagi

individu maupun keluarga sehingga mendorong PMI untuk mencari kerja dengan pendapatan yang lebih besar di luar negeri. Kondisi ekonomi sehari-hari yang kurang, terlebih lagi pada saat terjadi *pandemic* covid-19, pekerjaan semakin terbatas atau bahkan tidak ada, kebutuhan akan biaya hidup semakin banyak sehingga membuat seseorang terpaksa utang. Dorongan ekonomi ini tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan sehari-hari tetapi upaya untuk memperbaiki kebutuhan finansial jangka panjang. Selain itu, tingginya biaya pendidikan anak semakin memperkuat untuk bermigrasi ke luar negeri.

Faktor penarik individu bermigrasi adalah gaji yang besar. Upah yang tinggi dapat menarik minat individu untuk bermigrasi, dengan upah yang tinggi dapat mengubah tingkat perekonomian keluarga. Lingkungan juga menjadi faktor penarik individu melakukan migrasi internasional. Di mana ketika sudah jenuh dengan lingkungan yang lama maka individu akan berpindah dan mencari lingkungan yang baru untuk mencari pekerjaan dan pengalaman (Fikriansyah & Julia, 2023). Maka dari itu, yang mendasari keputusan orang untuk menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia) tidak lepas dari kombinasi faktor pendorong dan faktor penarik yang saling berkaitan baik dari kondisi sosial dan ekonomi (Arrazi et al., 2024)

Keputusan seseorang menjadi PMI membawa pada peningkatan kualitas hidup yang lebih baik dari sebelumnya. Perubahan kondisi ekonomi misalnya dapat membangun rumah yang lebih baik. Selain itu pekerjaan mantan PMI biasanya setelah pulang ke daerah asal adalah dengan membuka usaha atau kios sebagai strategi untuk bertahan hidup di tempat asal (Arrazi et al., 2024).

Hasil dari migrasi yang dilakukan selama bertahun-tahun seharusnya cukup untuk membiayai kebutuhan keluarga eks PMI selanjutnya. Sebelumnya mengandalkan hasil menjadi buruh tani, nelayan ataupun pekerjaan yang penghasilannya tidak tetap, saat ini sudah mempunyai pekerjaan sendiri. Bermodalkan gaji dari selama bekerja di luar negeri tersebut digunakan untuk mengumpulkan modal usaha yang berkeinginan untuk hidup lebih baik, digunakan untuk keperluan biaya sekolah anak dan kebutuhan rumah tangga, untuk ditabung, investasi sawah dan tanah pekarangan dan untuk kebutuhan

lainnya. Akan tetapi hal ini tidak semuanya orang yang menjadi PMI hidupnya menjadi lebih baik dan berkecukupan (Rini, 2021)

Eks pekerja migran Indonesia menghadapi kesulitan dalam menyesuaikan diri setelah masa kerja di luar negeri berakhir. Perubahan ini seringkali dialami oleh eks pekerja migran setelah kembali ke daerah asalnya. Ada berbagai alasan yang berkaitan dengan kondisi yang mengharuskan PMI lebih memilih menjadi eks PMI. Kondisi eks PMI yang memilih untuk kembali ke daerah asal berkaitan dengan beberapa kondisi yang mengharuskan PMI untuk kembali. Pertama surat izin PMI sudah tidak berlaku. Masa berlaku surat izin yang sudah habis dan PMI tidak ingin memperpanjang kontrak kerja karena dirasa cukup untuk merantau dan memperoleh pengalaman. Kedua, sudah bertahun-tahun tidak pulang dan berkumpul dengan keluarga. Setelah bertahun-tahun menjadi PMI (Pekerja Migran Indonesia), dan memutuskan untuk tidak kembali bekerja di luar negeri. Eks PMI mempunyai keinginan untuk lebih dekat dengan keluarga. Eks PMI ingin mencari pekerjaan di sekitar tempat tinggal, supaya bisa lebih dekat dengan anak dan keluarga. Keluarga eks PMI tidak menutup kemungkinan mengalami tantangan. Penghasilan utama yang diandalkan hanya berasal dari upah yang dihasilkan menjadi PMI. Kehadiran eks PMI di kampung halaman membawa harapan baru bagi keluarga meskipun kondisi ekonomi masih belum stabil. Namun ketergantungan pada penghasilan dari luar negeri membuat adaptasi finansial eks PMI menjadi sulit. Ketiga, tidakizinkan suami untuk melanjutkan kontrak apabila masa kerja sudah habis dan berfokus pada peran domestik, seperti memasak, mengerjakan pekerjaan rumah tangga, khususnya dalam hal pengasuhan anak di rumah. Akhirnya eks PMI harus mengikuti perintah suami dan menerima keputusan tersebut demi menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.

Kepulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) tidak selalu berkaitan dengan peningkatan taraf hidup. Seharusnya pengalaman bekerja PMI di luar negeri memungkinkan memperoleh pendapatan yang cukup untuk memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Penurunan ekonomi terjadi ketika mantan migran tidak menggunakan gaji dari hasil pekerjaannya sebagai PMI untuk

mengumpulkan modal usaha atau investasi di daerah asalnya (Arrazi et al., 2024). Bukannya mengalami peningkatan kesejahteraan, PMI justru mengalami ketidakstabilan ekonomi akibat dari kurangnya perencanaan keuangan selama menjadi PMI. Eks PMI tersebut menggunakan pendapatan yang diperoleh untuk pemakaian jangka pendek seperti membangun rumah, membangun *langghar*, tanpa mempertimbangkan investasi produktif untuk kelangsungan hidup selanjutnya.

Kondisi kerentanan ekonomi tersebut pada akhirnya mengarah kepada fenomena kemiskinan di kalangan eks Pekerja Migran Indonesia (PMI). Oleh karena itu, kerentanan yang dialami eks PMI di Desa Noreh ini dapat dilihat sebagai bagian dari fenomena kemiskinan struktural, yakni kemiskinan yang muncul akibat dari keterbatasan terhadap akses sumber daya, peluang dan perlindungan sosial yang memadai. Situasi yang dialami eks PMI di Desa Noreh mencerminkan adanya hambatan sistemik yang membuat tetap berada dalam lingkaran kemiskinan, meskipun sebelumnya telah memperoleh penghasilan yang cukup besar dari hasil migrasi ke luar negeri.

Kemiskinan merupakan kondisi yang tidak hanya diukur berdasarkan tingkat pendapatan, akan tetapi dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan rumah tangga. Untuk melihat kondisi kemiskinan secara lebih menyeluruh, Badan Pusat Statistik (BPS) menetapkan beberapa indikator yang digunakan sebagai acuan dalam menggambarkan rumah tangga miskin. Indikator tersebut meliputi beberapa aspek, seperti kondisi tempat tinggal, pola konsumsi, pendidikan, akses terhadap fasilitas dasar hingga kepemilikan aset. Adapun indikator-indikator kemiskinan menurut Badan Pusat Statistik terdiri atas 14 indikator sebagai berikut: 1) Luas lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8m² per orang. 2) jenis lantai tempat tinggal terbuat dari tanah atau bamboo atau kayu murahan. 3) jenis dinding tempat tinggal dari bambu atau kayu berkualitas rendah atau tembok tanpa diplester. 4) tidak memiliki fasilitas buang air besar atau bersama-sama dengan rumah tinggal lain. 5) sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik. 6) sumber air minum berasal dari sumur/ mata air tidak terlindung / sungai / air hujan. 7) bahan bakar untuk memasak

sehari-hari adalah kayu bakar / arang/ minyak tanah. 8) hanya mengkonsumsi daging, susu dan ayam dalam satu kali seminggu. 9) hanya membeli satu stel pakaian baru dalam setahun. 10) hanya sanggup makan sebanyak satu atau dua kali dalam sehari. 11) tidak sanggup membayar biaya pengobatan di puskesmas atau poliklinik. 12) sumber penghasilan kepala rumah tangga adalah petani dengan luas lahan 500 m², buruh tani, nelayan, buruh bangunan, buruh perkebunan dan pekerjaan lainnya dengan pendapatan di bawah Rp600.000 perbulan. 13) Pendidikan tertinggi kepala rumah tangga tidak sekolah atau tidak tamat SD / tamat SD. 14) tidak memiliki tabungan atau barang yang mudah dijual dengan minimal Rp500.000 seperti sepeda motor kredit / non kredit. Ternak, emas, kapal motor dan barang modal lainnya. Apabila sembilan indikator dari 14 indikator tersebut terpenuhi maka menurut BPS dapat dikategorikan sebagai rumah tangga miskin (Bela, 2023).

Pada tahun 2025, eks keluarga pekerja migran hanya mengandalkan penghasilan suaminya yang kembali menekuni pekerjaan lamanya sebelum menjadi pekerja migran yaitu menjaring ikan di laut. Pekerjaan ini memiliki risiko dan penghasilan yang tidak menentu. Karena pekerjaan nelayan bergantung kepada musim dan kondisi cuaca. Namun suami tetap memilih pekerjaan menjaring ikan untuk menghidupi keluarga meskipun penghasilannya jauh lebih besar pada saat menjadi PMI. Istrinya yang tidak lagi bekerja menjadi PMI karena tidak diizinkan oleh suaminya untuk bekerja. Kemudian kembali menjadi ibu rumah tangga yang mengurus anak dan keluarga di rumah karena tidak ada pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan istrinya tersebut. Menurut eks PMI, uang yang dihasilkan selama bekerja di luar negeri tersebut pasti masih ada meskipun tidak dijadikan modal untuk usaha dan masih cukup untuk keperluan hidup. Akan tetapi apakah uang tersebut akan cukup untuk kebutuhan jangka panjang, sehingga eks PMI tidak lagi berpikiran, hanya mengandalkan sisa upah selama menjadi PMI dan penghasilan suami dari menjaring ikan yang tidak menentu.

Selain itu, minimnya dukungan dari pemerintah atau lembaga terkait dan keterbatasan akses terhadap pelatihan keterampilan menyebabkan eks PMI kesulitan untuk kembali membangun hidup mereka di daerah asal. Apabila lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sesuai atau bahkan tidak ada di daerah asal PMI. Keterbatasan dalam merencanakan dan mengalokasikan penghasilan, terbatasnya akses terhadap pekerjaan di daerah asal, dan tidak adanya dukungan dari lembaga terkait atau pemerintah daerah pada akhirnya menempatkan eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) pada posisi yang rentan secara ekonomi. Kondisi tersebut menunjukkan permasalahan yang dihadapi eks PMI tidak hanya berasal dari faktor individu, melainkan juga berasal dari struktur sosial dan kelembagaan yang belum mendukung secara optimal.

Fenomena kemiskinan yang dialami oleh eks PMI di Desa Noreh menunjukkan bahwa kemiskinan tidak bisa dipahami hanya sebagai permasalahan rendahnya pendapatan semata. Kemiskinan tersebut bisa dikatakan sebagai kondisi ketidakmampuan eks PMI untuk memanfaatkan sumber daya secara optimal, meskipun sumber daya atau penghasilan tersebut pernah dimiliki. Uang hasil bekerja bertahun-tahun di luar negeri yang seharusnya bisa dijadikan modal untuk membangun kehidupan yang lebih mandiri, kenyataannya tidak mampu mengubah posisi ekonomi eks PMI secara berkelanjutan. Dengan demikian, persoalan yang dihadapi bukan terletak pada ketiadaan sumber daya, melainkan pada ketidakmampuan eks PMI untuk mendukung pemanfaatan sumber daya tersebut dengan produktif.

Kemiskinan yang dialami eks PMI juga terlihat dari terbatasnya pilihan yang tersedia bagi eks PMI. Ketergantungan pada satu sumber penghasilan dari pekerjaan suami eks PMI sebagai nelayan dan tertutupnya kesempatan bagi eks PMI untuk turut bekerja. Menunjukkan bahwa kemiskinan yang dialami keluarga eks PMI bukan sekadar akibat dari kurangnya usaha seseorang, melainkan akibat dari sempitnya pilihan pekerjaan yang tersedia di lingkungan tempat tinggalnya. Kondisi tersebut menegaskan bahwa kemiskinan yang dialami bukanlah karena kegagalan eks PMI dalam berusaha, melainkan bersumber dari keterbatasan struktural. Pengalaman dari luar negeri yang

seharusnya menjadi jalan keluar dari kemiskinan, akhirnya justru membawa eks PMI kembali pada kondisi ekonomi yang rentan.

Maka dari itu, berdasarkan penjelasan di atas dan permasalahan yang dialami mantan pekerja migran setelah kembali ke rumah atau daerah asalnya. Peneliti bermaksud meneliti tentang kemiskinan struktural: kajian sosiologis keluarga eks pekerja migran Indonesia (PMI) di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

1.2.Rumusan Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, maka ditemukan rumusan masalahnya yaitu bagaimana Kemiskinan Kultural Keluarga Eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) Di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang.

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui strategi adaptasi ekonomi yang dilakukan oleh eks Pekerja Migran Indonesia (PMI) setelah kembali ke daerah asal di Desa Noreh
- b. Mengungkap hambatan yang menyebabkan eks pekerja migran indonesia (PMI) sulit keluar dari lingkaran kemiskinan setelah bekerja menjadi pekerja migran dan kembali ke daerah asal
- c. Mengidentifikasi ciri-ciri dari budaya kemiskinan yang terdapat pada eks pekerja migran di Desa Noreh, kecamatan Sreseh kabupaten Sampang

1.4.Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait baik secara teoritis maupun praktis.

1.4.1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan wawasan serta meningkatkan kemampuan dan pemahaman baru mengenai permasalahan kemiskinan kultural yang dialami oleh

keluarga eks pekerja migran Indonesia di Desa Noreh Kecamatan Sreseh Kabupaten Sampang

- b. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap teori-teori terkait kemiskinan kultural keluarga mantan pekerja migran khususnya hubungan antara migrasi tenaga kerja, budaya lokal dan kemiskinan struktural di masyarakat pedesaan.
- c. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan dalam rujukan penelitian yang akan datang dan dapat memperkaya literatur ilmiah mengenai kemiskinan struktural yang dialami keluarga eks pekerja migran.

1.4.2. Manfaat Praktis

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis, diantaranya.

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran nyata kondisi kemiskinan kultural yang dialami oleh eks pekerja migran di Desa Noreh.
- b. Penelitian ini dapat membantu masyarakat dan keluarga eks pekerja migran memahami faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan eks PMI setelah menjadi pekerja migran sehingga bisa mendorong perubahan pola pikir dan kebiasaan yang produktif.